

Dilema Anarki: Strategi Intervensi Tidak Langsung NATO dalam Konflik Rusia-Ukraina

Annisa Khaira¹, Keisya Imani Murad², Suyani Marth³, Fatoumata Sonko⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia,

Article Info

Article History

Received: 06 March 2026

Revised: 16 May 2026

Accepted: 12 June 2026

Published: 22 June 2026

How to cite: Khaira, A., Murad, K. I., Marth, S., & Sonko, F. (2026). Dilema Anarki: Strategi Intervensi Tidak Langsung NATO dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Journal of International Relations Diponegoro*, 11(1), 98-116. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.58952>

*Email: keisyaauliya127@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of the Russia-Ukraine conflict in relation to NATO expansion and its implications for the international security architecture after 2022. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using secondary data derived from academic journals, official NATO documents, reports from international institutions, and various strategic and international relations literature. The analysis is based on Kenneth Waltz's Structural Realism (Neorealism), Robert Jervis's concept of security dilemma, and deterrence strategy theories developed by Thomas Schelling and Bernard Brodie. The findings indicate that NATO's expansion into Eastern Europe has been perceived by Russia as a strategic threat to its national security and regional balance of power. This condition has generated a security dilemma between Russia and NATO, which subsequently escalated the conflict in Ukraine. On the other hand, NATO has implemented an indirect intervention strategy through military, intelligence, and logistical assistance to Ukraine in order to strengthen deterrence without engaging in direct confrontation with Russia. In response, Russia has developed a modern military doctrine emphasizing hybrid warfare, anti-access/area denial (A2/AD) strategies, military modernization, and the use of nuclear threats as deterrence instruments.

Keyword: Russia-Ukraine, NATO, international security.

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika konflik Rusia-Ukraina dalam kaitannya dengan ekspansi NATO serta implikasinya terhadap arsitektur keamanan internasional pasca-2022. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan 1 memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, dokumen resmi NATO, laporan lembaga internasional, serta berbagai literatur strategis dan hubungan internasional. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Neorealisme Struktural Kenneth Waltz, konsep security dilemma Robert Jervis, dan teori deterrence strategy dari Thomas Schelling serta Bernard Brodie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi NATO ke kawasan Eropa Timur dipersepsikan Rusia sebagai ancaman strategis terhadap keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan regional. Kondisi tersebut memunculkan security dilemma antara Rusia dan NATO yang kemudian mendorong eskalasi konflik di Ukraina. Di sisi lain, NATO menerapkan strategi intervensi tidak langsung melalui bantuan militer, intelijen, dan logistik kepada Ukraina guna memperkuat deterrence tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Sebagai respons, Rusia mengembangkan doktrin militer modern yang menekankan perang hibrida, strategi anti-access/area denial (A2/AD), modernisasi militer, serta penggunaan ancaman nuklir sebagai instrumen penangkalan.

Keyword: Rusia-Ukraina, NATO, keamanan internasional.

PENGANTAR

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu isu internasional paling penting di era modern karena melibatkan persaingan militer, rivalitas geopolitik, dan persoalan keamanan global. Perang ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga mengubah dinamika politik dan keamanan di Eropa maupun sistem internasional. Salah satu faktor utama di balik konflik tersebut adalah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan North Atlantic Treaty Organization (NATO), terutama setelah NATO memperluas pengaruhnya ke kawasan Eropa Timur pasca berakhirnya Perang Dingin (Eichler, 2021).

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak negara di Eropa Timur bergabung dengan NATO untuk memperkuat keamanan dan hubungan politik mereka dengan negara-negara Barat. Meskipun NATO menyatakan bahwa ekspansi tersebut bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas di Eropa, Rusia memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan pengaruh regionalnya (Goldgeier & Shiffrinson, 2023). Ketegangan semakin meningkat ketika Ukraina mulai menjalin hubungan dengan NATO dan menunjukkan keinginan untuk menjadi anggota aliansi tersebut. Karena letaknya berada di antara Rusia dan negara-negara anggota NATO, Ukraina memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam politik keamanan kawasan. Konflik Rusia–Ukraina juga mencerminkan konsep security dilemma dalam hubungan internasional, yaitu situasi ketika upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanan justru menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi negara lain. Ukraina memandang NATO sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman eksternal, sedangkan Rusia menganggap kerja sama Ukraina dengan NATO sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanannya (Ozgoeker, 2017). Akibatnya, ketegangan politik secara perlahan berkembang menjadi konfrontasi militer dan konflik geopolitik yang lebih luas. Makalah ini akan membahas beberapa aspek penting terkait konflik Rusia–Ukraina dan keterlibatan NATO. Pembahasan pertama menjelaskan ekspansi NATO dan dilema keamanan Rusia–Ukraina. Bagian kedua menganalisis strategi intervensi tidak langsung NATO pasca perang tahun 2022. Bagian ketiga membahas doktrin militer dan kontra-strategi Rusia dalam menghadapi NATO dan Ukraina. Terakhir, makalah ini akan mengkaji dampak konflik terhadap tatanan internasional dan arsitektur keamanan global. Melalui pembahasan tersebut, makalah ini bertujuan memahami bagaimana rivalitas geopolitik, strategi militer, dan persaingan keamanan memengaruhi hubungan internasional di era kontemporer (Mearsheimer, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Realisme Struktural

Dalam pandangan Neorealisme atau Realisme Struktural, fitur utama dari politik internasional adalah anarki, yaitu ketiadaan otoritas pusat di atas negara. Karena tidak ada pemerintah global yang menjamin keamanan, setiap negara harus bergantung pada upaya mandiri atau self-help untuk bertahan hidup (Waltz, 1959). Kenneth N. Waltz dalam *Man, the State, and War* (1959) mengembangkan kerangka yang dikenal sebagai tiga images (citra) untuk menjelaskan penyebab perang. Citra ketiga atau third image, yang menjadi fondasi utama

realisme struktural (neorealisme), menekankan bahwa penyebab utama konflik internasional bukan terletak pada sifat manusia (*first image*) atau struktur dalam negara (*second image*), melainkan pada struktur sistem internasional itu sendiri, yaitu anarki (ketiadaan otoritas pusat yang berdaulat di atas negara-negara). Dalam kondisi anarki, negara-negara dipaksa berperilaku dalam sistem *self-help*, di mana setiap 3 negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Waltz, 2018). Menurut Waltz, anarki internasional menciptakan *security dilemma* dan mendorong negara-negara untuk terus-menerus mencari kekuasaan relatif (*relative gains*) guna menyeimbangkan ancaman yang ada. Negara tidak bisa sepenuhnya mempercayai niat negara lain, sehingga tindakan yang diambil untuk meningkatkan keamanan diri sendiri justru dapat dianggap mengancam oleh pihak lain. Hal ini menjelaskan mengapa kompetisi kekuasaan dan pembentukan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) menjadi pola yang berulang dalam politik internasional (Waltz, 2018). Neorealisme Waltz menekankan bahwa perilaku negara lebih banyak ditentukan oleh struktur sistem daripada oleh karakter pemimpin atau ideologi dalam negeri. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, pendekatan neorealisme struktural membantu menjelaskan intervensi tidak langsung NATO sebagai bentuk *balancing* terhadap ekspansi pengaruh Rusia di Eropa Timur. NATO, sebagai aliansi yang didorong oleh kekhawatiran akan ketidakseimbangan kekuatan, memberikan dukungan militer dan intelijen kepada Ukraina tanpa terlibat langsung untuk menghindari eskalasi nuklir, sekaligus melemahkan Rusia melalui perang *proxy*. Tindakan ini mencerminkan logika anarki di mana negara-negara besar berusaha mempertahankan atau memulihkan keseimbangan kekuatan regional tanpa harus memicu konfrontasi total (Waltz, 1959).

Konsep Dilema Keamanan

Menurut Jervis, dalam sistem internasional yang anarkis, tindakan yang diambil suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri sering kali justru menimbulkan ketidakamanan bagi negara lain. Hal ini terjadi karena sulitnya membedakan antara niat defensif dan ofensif, sehingga tindakan pertahanan satu pihak dapat diinterpretasikan sebagai ancaman oleh pihak lain. Akibatnya, muncul spiral kompetisi dan ketidakpercayaan yang memperburuk hubungan antarnegara (Jervis, 1978). Jervis menjelaskan bahwa intensitas *security dilemma* dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu keseimbangan *offense-defense* (apakah serangan atau pertahanan yang lebih diuntungkan) dan kemampuan membedakan postur ofensif dengan defensif. Ketika senjata dan postur pertahanan sulit dibedakan serta ofensif memiliki keunggulan, *security dilemma* menjadi sangat intens dan berpotensi memicu perlombaan senjata serta konflik. Sebaliknya, jika pertahanan lebih unggul dan postur dapat dibedakan, peluang kerjasama antarnegara *status quo* akan lebih besar (Jervis, 1978). Dalam analisis konflik Rusia-Ukraina, konsep *security dilemma* membantu menjelaskan dinamika antara Rusia dan NATO. Ekspansi NATO ke timur yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan negara-negara Eropa Timur justru dilihat Rusia sebagai ancaman eksistensial, sehingga mendorong aksi militer Rusia. Sementara itu, dukungan tidak langsung NATO kepada Ukraina merupakan respons terhadap persepsi ancaman dari Rusia, yang mencerminkan spiral *security dilemma* di mana kedua pihak berusaha memperkuat posisinya namun justru meningkatkan ketegangan secara keseluruhan (Jervis, 1978).

Konsep Penangkalan

Menurut Thomas C. Schelling, penangkalan adalah upaya untuk mencegah tindakan musuh dengan meyakinkan bahwa biaya yang akan diterima jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Penangkalan bekerja melalui ancaman kredibel yang dapat meyakinkan pihak lawan untuk tidak melakukan agresi, baik melalui deterrence by punishment (hukuman) maupun deterrence by denial (penolakan) (Schelling, 1966). Dalam konteks nuklir, penangkalan menjadi sangat krusial karena adanya risiko kehancuran bersama (mutually assured destruction). Bernard Brodie menekankan bahwa dalam era nuklir, tujuan utama angkatan bersenjata bukan lagi untuk memenangkan perang, melainkan untuk mencegah terjadinya perang itu sendiri. Kekuatan nuklir berfungsi sebagai instrumen penangkalan yang stabil selama kedua pihak menyadari bahwa penggunaan senjata nuklir akan menghancurkan keduanya. Oleh karena itu, stabilitas penangkalan nuklir bergantung pada kredibilitas ancaman, komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan ketakutan (balance of terror) (Brodie, 1959). Dalam konflik Rusia-Ukraina, strategi penangkalan NATO terlihat pada pendekatan tidak langsungnya. NATO memberikan dukungan militer signifikan kepada Ukraina untuk meningkatkan biaya invasi Rusia, namun secara sadar menghindari konfrontasi militer langsung dengan Rusia guna mencegah eskalasi ke tingkat nuklir. Rusia pun menggunakan ancaman nuklir sebagai bentuk penangkalan terhadap intervensi langsung NATO. Dinamika ini menunjukkan bagaimana strategi penangkalan membentuk batas-batas perilaku kedua pihak dalam kondisi anarki internasional (Schelling, 1966; Brodie, 1959).

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis sebagai landasan metodologis utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat kompleks, multidimensi, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka atau variabel kuantitatif yang terukur secara statistik. Objek kajian penelitian ini yakni dinamika geopolitik konflik Rusia-Ukraina, pengaruh strategis NATO, dan transformasi arsitektur keamanan internasional pasca-2022 merupakan fenomena sosial-politik yang memerlukan pemahaman mendalam, interpretasi kontekstual, dan analisis konseptual yang komprehensif (Creswell & Creswell, 2018). Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan fakta empiris yang ada, melainkan juga berupaya menganalisis, menginterpretasikan, dan menjelaskan hubungan kausal serta implikasi strategis dari setiap fenomena yang dikaji. Kesesuaian pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga didukung oleh karakter disiplin Hubungan Internasional itu sendiri, yang secara epistemologis lebih banyak bertumpu pada interpretasi teoritis dan analisis tekstual daripada pengukuran empiris yang bersifat positivistik sempit. Analisis terhadap pengaruh strategis NATO dan respons Rusia pasca-invasi 2022 membutuhkan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan motivasi aktor negara, persepsi ancaman, dan kalkulasi geopolitik aspek-aspek yang jauh lebih produktif dikaji melalui lensa neorealisme Waltz, konsep security dilemma Jervis, dan doktrin deterrence strategy, ketimbang melalui pendekatan statistik (Waltz, 1979; Jervis, 1978). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif-analitis merupakan pilihan metodologis yang paling tepat dan koheren untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. Data sekunder dipahami sebagai data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum peneliti menggunakannya, sehingga peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data primer di lapangan (Sugiyono, 2019). Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian strategis dan geopolitik pada umumnya bersandar pada dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan literatur akademis yang telah melalui proses verifikasi dan publikasi ilmiah, bukan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. 6 Sumber data dalam penelitian ini mencakup beberapa kategori utama. Pertama, jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam bidang Hubungan Internasional, kajian strategis, dan keamanan global, termasuk di antaranya karya-karya Mearsheimer (2014) tentang krisis Ukraina, analisis Jervis (1978) mengenai security dilemma, dan teori sistem internasional Waltz (1979). Kedua, dokumen dan laporan resmi dari lembaga-lembaga internasional, khususnya NATO Strategic Concept 2022 yang menjadi referensi normatif utama kebijakan aliansi. Ketiga, laporan penelitian dari lembaga think tank internasional terkemuka seperti RAND Corporation, Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Keempat, buku teks akademis dalam bidang studi strategis dan Hubungan Internasional yang memberikan kerangka konseptual bagi analisis penelitian ini, termasuk karya Buzan (1994), Freedman (2022), dan Hermawanto (2026). Kelima, sumber berita internasional kredibel yang digunakan secara selektif dan kritis untuk memverifikasi perkembangan faktual di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yakni suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014). Metode ini dipandang paling sesuai untuk penelitian yang bersifat kajian teoritis dan analitis terhadap fenomena geopolitik, mengingat bahwa data yang diperlukan bersumber dari dokumen, laporan, dan literatur yang telah tersedia secara publik dan dapat diakses melalui berbagai platform akademis. Proses studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu menelusuri dan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan tema NATO, konflik Rusia-Ukraina, security dilemma, dan arsitektur keamanan internasional melalui basis data akademis seperti JSTOR, Google Scholar, dan repositori lembaga-lembaga strategis. Tahap kedua adalah seleksi sumber, yaitu mengevaluasi relevansi, kredibilitas, dan kualitas setiap sumber berdasarkan reputasi penerbitan, kualifikasi penulis, dan kesahihan argumen yang dikemukakan. Tahap ketiga adalah ekstraksi data, yaitu membaca secara kritis dan mengambil informasi yang relevan dari setiap sumber yang telah terseleksi. Dalam proses ini, peneliti secara aktif memetakan posisi argumentatif setiap sumber dalam kaitannya dengan kerangka teoritis yang digunakan, 7 khususnya neorealisme (Mearsheimer, 2014) dan konsep *balance of power* yang dikembangkan oleh Waltz (1979).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas empat tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung secara iteratif: reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, keseluruhan informasi yang berhasil dikumpulkan melalui studi pustaka dipilah, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan

relevansinya terhadap rumusan masalah dan kerangka teoritis yang digunakan. Data yang tidak relevan atau bersifat repetitif disisihkan, sementara data yang memiliki nilai analitis tinggi seperti argumen Mearsheimer tentang ekspansi NATO sebagai pemicu konflik (Mearsheimer, 2014), konsepsi Jervis tentang spiral eskalasi (Jervis, 1978), dan data pengeluaran pertahanan dari SIPRI (2024) dipertahankan dan dikategorikan secara tematik. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara naratif dalam bentuk uraian analitis yang koheren, mengintegrasikan data empiris dengan kerangka teoretis secara organik. Pada tahap interpretasi, data yang telah disajikan kemudian diinterpretasikan secara kritis melalui lensa teoritis yang relevan: neorealisme digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang anarki (Waltz, 1979); konsep security dilemma digunakan untuk menganalisis spiral persepsi ancaman antara NATO/Ukraina dan Rusia (Jervis, 1978); balance of power digunakan untuk mengkaji dinamika perimbangan kekuasaan yang sedang berlangsung; dan deterrence strategy digunakan untuk memahami kalkulasi pencegahan nuklir dan militer dari kedua pihak yang berkonflik. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana seluruh temuan analitis disintesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan koheren, sehingga menghasilkan proposisi interpretatif yang berbobot ilmiah dan berkontribusi pada pengembangan kajian strategis dalam Hubungan Internasional (Anak Agung Banyu P., dkk., 2013).

PEMBAHASAN

Ekspansi NATO dan Anatomi Dilema Keamanan Rusia-Ukraina

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 menjadi titik perubahan besar dalam politik internasional, khususnya dalam sistem keamanan Eropa. Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan perubahan keseimbangan kekuatan global serta membuka jalan bagi negara-negara Eropa Timur untuk mendekat kepada Barat (Eichler, 2021). Dalam situasi tersebut, North Atlantic Treaty Organization (NATO) tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai aliansi militer Barat, tetapi juga melakukan ekspansi ke kawasan Eropa Timur yang sebelumnya berada dalam pengaruh Soviet (Goldgeier & Shiffrinson, 2023). Selain perubahan dalam struktur keamanan Eropa, berakhirnya Perang Dingin juga menciptakan persaingan baru antara Rusia dan Barat dalam menentukan arah politik kawasan Eropa Timur. Banyak negara bekas Uni Soviet mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat dan institusi Barat, termasuk NATO dan Uni Eropa. Kondisi ini menyebabkan Rusia merasa kehilangan pengaruh geopolitiknya di kawasan yang selama beberapa dekade berada dalam orbit kekuasaannya (Goldgeier & Shiffrinson, 2023). Bagi negara-negara Eropa Timur, bergabung dengan NATO dianggap sebagai langkah strategis untuk memperoleh jaminan keamanan, stabilitas politik, serta perlindungan dari kemungkinan ancaman eksternal. Banyak negara di kawasan tersebut memiliki pengalaman sejarah yang buruk dengan dominasi Soviet sehingga mereka melihat NATO sebagai simbol perlindungan dan kebebasan politik. Akan tetapi, Rusia memandang ekspansi NATO sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional dan keamanan domestiknya (Mearsheimer, 2014). Ketegangan semakin meningkat ketika Ukraina menunjukkan keinginan untuk mendekat kepada Barat dan bergabung dengan NATO. Dalam kajian hubungan internasional, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep security dilemma

atau dilema keamanan. Konsep ini menjelaskan bahwa tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanan justru dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain sehingga memicu ketegangan dan konflik (Ozgoeker, 2017). Oleh karena itu, ekspansi NATO dan upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya konflik geopolitik antara Rusia dan Barat.

Analisis Gelombang Perluasan NATO ke Eropa Timur

Setelah berakhirnya Perang Dingin, NATO mulai melakukan perluasan ke wilayah Eropa Timur. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1999 ketika Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria resmi menjadi anggota NATO. Perluasan ini kemudian berlanjut pada tahun 2004 dengan masuknya Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, dan Rumania (Eichler, 2021). Setelah itu, NATO terus menerima anggota baru dari kawasan Balkan dan Eropa Timur lainnya. Dari perspektif Barat, perluasan NATO dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Eropa pasca runtuhnya Uni Soviet. Negara-negara bekas blok Soviet dianggap membutuhkan perlindungan keamanan dan integrasi dengan institusi Barat agar dapat memperkuat demokrasi dan menghindari ancaman konflik regional. NATO juga dianggap sebagai alat untuk menjaga keseimbangan keamanan di Eropa serta mencegah munculnya konflik baru setelah Perang Dingin. Perluasan NATO juga memperlihatkan perubahan peran aliansi tersebut setelah Perang Dingin. Pada awal pembentukannya, NATO berfungsi untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Namun setelah Uni Soviet runtuh, NATO tetap mempertahankan eksistensinya dan bahkan memperluas pengaruhnya ke kawasan Eropa Timur. Bagi Rusia, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan jangka panjang NATO serta kemungkinan meningkatnya dominasi Barat dalam sistem internasional (Eichler, 2021). Namun, Rusia memandang ekspansi NATO secara berbeda. Pemerintah Rusia menilai bahwa perluasan NATO telah mendekati wilayah perbatasannya dan mengancam keseimbangan keamanan regional (Goldgeier & Shiffrinson, 2023).

Rusia merasa bahwa Barat telah melanggar semangat kerja sama pasca-Perang Dingin dengan terus memperluas pengaruh militernya ke kawasan yang sebelumnya berada dalam pengaruh Rusia. Dalam perspektif realisme, negara besar akan selalu berusaha mempertahankan zona pengaruhnya untuk menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, Rusia memandang ekspansi NATO sebagai bentuk ancaman strategis (Mearsheimer, 2014, p. 80). Kekhawatiran Rusia semakin besar ketika NATO mulai membuka peluang keanggotaan bagi Ukraina dan Georgia. Kedua negara tersebut berada sangat dekat dengan wilayah inti Rusia sehingga kemungkinan bergabungnya mereka dengan NATO dianggap dapat mempersempit ruang pertahanan Rusia. Selain itu, Rusia juga menganggap bahwa kehadiran NATO di dekat perbatasannya dapat mempermudah penempatan sistem pertahanan rudal, pangkalan militer, serta aktivitas militer Barat di kawasan tersebut. Situasi ini menyebabkan meningkatnya rasa tidak aman Rusia terhadap kebijakan luar negeri Barat. Dalam jangka panjang, ekspansi NATO tidak hanya dipandang sebagai isu keamanan, tetapi juga sebagai persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Eurasia.

Ukraina sebagai Buffer State dan Pentingnya bagi Pertahanan Rusia

Ukraina memiliki posisi geopolitik yang sangat penting dalam hubungan antara Rusia dan Barat. Dalam geopolitik, *buffer state* atau negara penyangga merupakan negara yang berada di antara dua kekuatan besar dan berfungsi mengurangi kemungkinan konflik langsung (Ozgoeker, 2017). Ukraina terletak di antara Rusia dan negara-negara anggota NATO di Eropa Timur sehingga negara ini memiliki peran strategis dalam sistem keamanan kawasan. Bagi Rusia, keberadaan Ukraina sebagai negara netral sangat penting untuk mempertahankan kedalaman strategis pertahanannya. Secara historis, Rusia pernah mengalami berbagai invasi besar melalui wilayah Eropa Timur, seperti invasi Napoleon pada abad ke-19 dan invasi Jerman Nazi pada Perang Dunia II. Pengalaman sejarah tersebut membentuk pandangan strategis Rusia bahwa wilayah penyangga sangat penting untuk melindungi pusat-pusat kekuasaan Rusia dari ancaman luar. Dari sisi geopolitik, Ukraina juga memiliki posisi penting karena menjadi jalur ekonomi dan energi antara Rusia dan Eropa. Banyak jalur pipa gas Rusia menuju Eropa melewati wilayah Ukraina sehingga stabilitas negara tersebut sangat berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi Rusia maupun negara-negara Eropa.

Oleh karena itu, konflik di Ukraina tidak hanya berkaitan dengan keamanan militer, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan politik internasional. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka pengaruh militer Barat akan berada sangat dekat dengan wilayah inti Rusia. Kondisi tersebut dipandang Kremlin sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia (Goldgeier & Shiffrinson, 2023). Oleh sebab itu, Rusia berusaha mempertahankan pengaruh politik dan keamanan di Ukraina agar negara tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Barat. Selain faktor keamanan, Ukraina juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang penting bagi Rusia. Kedua negara memiliki hubungan sejarah yang panjang sejak masa Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Banyak elite politik Rusia memandang Ukraina sebagai bagian penting dari identitas sejarah dan geopolitik Rusia. Oleh karena itu, perubahan orientasi politik Ukraina menuju Barat dianggap sebagai ancaman terhadap posisi Rusia sebagai kekuatan besar di kawasan Eurasia.

Aplikasi Teori: Keinginan Ukraina Masuk NATO dan Security Dilemma bagi Kremlin

Konsep *security dilemma* merupakan salah satu konsep penting dalam teori realisme hubungan internasional. Konsep ini menjelaskan bahwa tindakan defensif suatu negara untuk meningkatkan keamanan dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Akibatnya, negara lain akan meningkatkan kemampuan militernya sehingga menciptakan siklus ketidakpercayaan dan ketegangan (Ozgoeker, 2017, pp. 119–120). Dalam konteks Rusia dan Ukraina, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dipandang sebagai langkah defensif oleh pemerintah Ukraina. Ukraina melihat NATO sebagai alat untuk melindungi diri dari ancaman Rusia, terutama setelah konflik di Krimea dan Donbas sejak tahun 2014. Dengan bergabung ke NATO, Ukraina berharap memperoleh jaminan keamanan kolektif dari negara-negara Barat. Namun, Rusia memandang langkah tersebut secara berbeda. Dari sudut pandang Kremlin, bergabungnya Ukraina dengan NATO akan memperbesar ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Rusia khawatir bahwa NATO dapat menempatkan infrastruktur militer, sistem pertahanan rudal, atau pasukan militer di wilayah Ukraina (Eichler, 2021, pp. 60–61). Kondisi tersebut dianggap dapat mengurangi kemampuan pertahanan Rusia dan

mempersempit ruang strategisnya. Security dilemma sering kali terjadi dalam hubungan antara negara besar yang memiliki tingkat kecurigaan tinggi terhadap satu sama lain.

Dalam kasus Rusia dan NATO, kedua pihak sama-sama mengklaim bahwa tindakan mereka bersifat defensif. NATO menyatakan bahwa perluasan dilakukan untuk menjaga keamanan negara anggota, sedangkan Rusia menganggap respons militernya diperlukan untuk mempertahankan keamanan nasional. Akan tetapi, tindakan kedua pihak justru memperbesar rasa tidak aman dan meningkatkan risiko konflik terbuka (Ozgoeker, 2017, p. 122). 12 Situasi ini memperlihatkan bagaimana security dilemma bekerja dalam politik internasional. Upaya Ukraina meningkatkan keamanan justru memicu rasa tidak aman Rusia. Sebagai respons, Rusia meningkatkan tekanan politik, ekonomi, dan militer terhadap Ukraina. Akan tetapi, tindakan Rusia tersebut kemudian semakin memperkuat keinginan Ukraina untuk memperoleh perlindungan dari NATO. Akibatnya, kedua pihak terjebak dalam siklus ketidakpercayaan yang terus meningkatkan eskalasi konflik.

Strategi Intervensi Tidak Langsung NATO dalam Perang Pasca-2022

Bantuan NATO kepada Ukraina merupakan bentuk intervensi proksi di mana aliansi ini menyediakan kapabilitas militer krusial tanpa keterlibatan tempur langsung demi membendung agresi Rusia (thoriq, 2025,1). Sebagai aliansi militer terbesar di kawasan Euro-Atlantik NATO mengambil langkah ini sebagai cara untuk mencapai kepentingan bagi keamanannya dengan memberikan berbagai bentuk bantuan persenjataan, logistik, dan pelatihan kepada Ukraina yang terdampak oleh invasi Rusia terhadap negaranya, dalam hal ini NATO juga tetap berhati-hati agar tidak terlibat secara langsung dengan hanya memberikan bantuan untuk mendukung Ukraina. Dengan adanya bantuan berupa modernisasi infrastruktur C4ISR (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Peninjauan) melalui kemitraan dengan NATO Communications and Information Agency (NCIA) yang menyediakan sistem komunikasi digital aman serta intelijen real-time untuk kesadaran situasional di medan perang yang disepakati antara NCIA dan militer Ukraina pada 17 Januari 2022 untuk melanjutkan proyek pengembangan teknologi dan komunikasi militer (Ali,2026 p.616). NATO mendukung Ukraina agar memiliki jaringan kontrol digital yang kompatibel sesuai dengan standar aliansinya sendiri (Ali,2026, p.616-617).

Disamping itu dalam aspek persenjataan darat, pengiriman sistem artileri presisi tinggi seperti HIMARS dan M270 MLRS telah menjadi katalisator dalam serangan balik di wilayah strategis seperti Kharkiv dan Kherson, yang didukung oleh suplai tank tempur utama seperti Leopard 2 dan M1 Abrams yang memberikan daya pukul dan perlindungan lebih baik dibanding tank era Soviet (Ali,2026 p.618), Kehadiran sistem roket HIMARS dan M270 memungkinkan Ukraina menghancurkan pos komando, jalur logistik, dan gudang amunisi Rusia jauh di belakang garis musuh dengan akurasi sangat tinggi. Dampak nyatanya adalah keberhasilan Ukraina merebut kembali wilayah Kharkiv dan Kherson, NATO tidak mengirim 13 pasukan, tetapi mengirim "otot" militer yang membuat Ukraina mampu beralih dari posisi bertahan menjadi menyerang balik secara efektif. Guna memitigasi serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur vital, NATO telah mengintegrasikan payung pertahanan udara berlapis yang mencakup sistem Patriot, NASAMS, dan IRIS-T, yang secara bertahap menggantikan alutsista warisan era Soviet (Ali,2026 p.619-620). Untuk melindungi fasilitas penting Ukraina

dari kehancuran, NATO membangun sistem pertahanan udara berlapis yang mengkombinasikan berbagai teknologi modern untuk mencegah rudal Rusia di berbagai radius jarak dan ketinggian. Lapisan ini diperkuat oleh sistem Patriot untuk jarak jauh dan rudal balistik, serta NASAMS dan IRIS-T untuk target jarak menengah hingga pendek. Eskalasi bantuan ini kini mencakup kapabilitas serangan jarak jauh melalui rudal Storm Shadow serta modernisasi kekuatan udara melalui pengoperasian jet tempur F-16 (Ali, 2026). Pengiriman rudal Storm Shadow memberikan Ukraina kemampuan untuk menyerang target strategis musuh yang berada jauh di belakang garis pertahanan, dan jet tempur F-16, yang sekaligus mengubah doktrin militer Ukraina agar sepenuhnya selaras (interoperabel) dengan standar Barat. NATO secara konsisten menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia untuk memastikan bahwa perang di Ukraina tidak mengalami eskalasi dan meluas ke luar wilayah tersebut, karena hal itu akan jauh lebih berbahaya dan merusak bagi semua negara yang terlibat. NATO juga secara strategis menghindari konfrontasi langsung dengan militer Rusia guna mencegah eskalasi konflik meluas yang berisiko memicu perang nuklir global, sebuah skenario yang ditegaskan sebagai peperangan yang tidak akan pernah bisa dimenangkan dan tidak boleh dilakukan karena konsekuensinya yang bersifat eksistensial (Ciaramella & Green, 2025). Aliansi ini membatasi keterlibatannya pada dukungan bantuan militer, intelijen, dan pelatihan karena pengerahan pasukan tempur langsung atau pemberlakuan zona larangan terbang di Ukraina dapat membawa NATO ke dalam konflik bersenjata langsung dengan kekuatan nuklir Rusia (Ciaramella & Green, 2025). Dalam hal ini NATO sedang melakukan kalkulasi risiko yang pragmatis, NATO tetap ingin Rusia kalah atau melemah di Ukraina melalui bantuan militer yang masif, namun NATO tidak ingin mengorbankan keamanan global dan keselamatan negara-negara anggotanya dengan memicu eskalasi konflik yang melibatkan perlawanan kekuatan nuklir.

Prospek keanggotaan Ukraina di NATO dapat dimanfaatkan secara strategis sebagai posisi tawar (leverage) politik dan jaminan keamanan jangka panjang untuk mengakhiri konflik dengan Rusia. Meskipun integrasi penuh baru dapat terwujud setelah adanya gencatan senjata resmi, Barat perlu mengirimkan sinyal kuat sejak sekarang bahwa bergabungnya Ukraina adalah sebuah kepastian guna membuktikan kepada Rusia bahwa melanjutkan perang adalah tindakan sia-sia. Untuk memotivasi Moskow agar mau menerima realitas keamanan baru ini, status keanggotaan Ukraina harus tetap menjadi harga mati, namun dikombinasikan dengan pendekatan kompromi berupa pembatasan penempatan sistem senjata strategis atau larangan pangkalan militer permanen NATO di wilayah Ukraina (Ciaramella & Green, 2025). Guna memitigasi risiko eskalasi konflik, negara-negara anggota NATO menggunakan strategi pintar layaknya individu yang memberikan bantuan secara pribadi agar kelompok besar mereka tidak ikut terseret dalam masalah yang berbahaya. Bukannya mengirimkan persenjataan mematikan secara kolektif atas nama institusi NATO, mereka memilih untuk menyalurkannya secara bilateral dari satu negara langsung ke Ukraina (UAI, 2022). Melalui pendekatan mandiri ini, aliansi dapat terus memperkuat daya tahan militer Ukraina di medan perang sembari menjaga posisi politik mereka agar tetap aman dan tidak dicap sebagai pihak resmi yang terlibat dalam peperangan langsung melawan Rusia (Mills & Brien). Fokus utama NATO tetap pada penguatan daya tangkal (deterrence) dan resiliensi pertahanan Ukraina melalui bantuan strategis agar Ukraina mampu mempertahankan diri secara mandiri, sambil memastikan bahwa tindakan

aliansi tetap berada dalam kerangka defensif demi melindungi integritas wilayah negara anggota tanpa memicu konfrontasi nuklir yang tidak terkendali (Ciaramella & Green, 2025).

Ukraina dan negara-negara NATO harus bekerja sama merumuskan syarat dan bentuk keanggotaan Ukraina setelah perang selesai untuk menjamin status keamanan Ukraina dari perang yang mungkin bisa saja terjadi lagi, namun proses ini akan sangat rumit dan membuat negara-negara sekutu merasa khawatir karena arah perang yang belum pasti serta adanya risiko eskalasi konflik yang masih berlanjut di masa depan (Ciaramella & Green, 2025). Satu hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa Rusia tetap merasa gentar terhadap Pasal 5 Piagam NATO yang mengatur pertahanan kolektif aliansi. Meskipun para skeptis menilai Rusia tetap akan menantang NATO jika Ukraina bergabung, bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya; Moskow memang ingin menguasai Ukraina, namun mereka jauh lebih takut untuk memicu perang langsung dengan NATO. Hal ini terlihat dari sikap Putin yang, meski terus 15 melontarkan ancaman keras, secara konsisten sangat berhati-hati untuk tidak pernah menyerang wilayah kedaulatan negara anggota NATO (Ciaramella & Green, 2025).

Doktrin Militer dan Kontra-Strategi Rusia

Doktrin militer Rusia merupakan salah satu elemen utama dalam memahami dinamika konflik Rusia–Ukraina dan hubungan Rusia dengan NATO. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Rusia mengalami perubahan besar dalam orientasi keamanan dan strategi pertahanannya. Jika pada masa Uni Soviet fokus utama berada pada konfrontasi langsung dengan blok Barat melalui kekuatan konvensional berskala besar, maka Rusia modern mulai mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel, multidimensional, dan adaptif terhadap ancaman global maupun regional. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perluasan NATO ke kawasan Eropa Timur, intervensi Barat di beberapa negara, serta meningkatnya persaingan geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat (Galeotti, 2019). Doktrin Militer Rusia tahun 2014 menempatkan NATO sebagai ancaman eksternal utama terhadap keamanan nasional Rusia. Dalam doktrin tersebut dijelaskan bahwa ekspansi NATO ke wilayah yang semakin dekat dengan perbatasan Rusia dianggap sebagai bentuk ancaman strategis yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan regional (Russian Federation, 2014). Pandangan ini menjadi dasar utama bagi Rusia dalam memperkuat kapasitas militernya, baik melalui modernisasi senjata, peningkatan kesiapan tempur, maupun pengembangan strategi perang baru.

Rusia memandang bahwa dominasi Barat dalam sistem internasional dapat mengurangi pengaruh geopolitiknya dan mengancam stabilitas keamanan nasionalnya. Salah satu karakteristik utama doktrin militer Rusia modern adalah penggunaan konsep “perang hibrida” atau hybrid warfare. Konsep ini menggabungkan operasi militer konvensional dengan serangan siber, propaganda informasi, tekanan ekonomi, manipulasi politik, dan operasi intelijen untuk mencapai tujuan strategis tanpa harus selalu menggunakan perang terbuka secara penuh (Hoffman, 2007). Dalam konteks konflik Ukraina, strategi ini terlihat jelas sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014. Rusia menggunakan pasukan tanpa identitas resmi yang dikenal sebagai “little green men”, disertai operasi informasi dan propaganda media untuk memengaruhi opini publik lokal maupun internasional. Pendekatan ini memungkinkan Rusia mencapai tujuan strategis dengan meminimalkan risiko konfrontasi langsung berskala besar dengan NATO. 16 Selain perang hibrida, Rusia juga mengembangkan strategi yang dikenal

sebagai “Gerasimov Doctrine”, yang merujuk pada pemikiran Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengenai pentingnya integrasi antara instrumen militer dan nonmiliter dalam konflik modern. Gerasimov menekankan bahwa garis antara perang dan damai menjadi semakin kabur karena penggunaan teknologi informasi, propaganda, tekanan politik, serta operasi psikologis dapat sama efektifnya dengan penggunaan kekuatan militer langsung (Gerasimov, 2013). Walaupun beberapa akademisi berpendapat bahwa istilah “Doktrin Gerasimov” lebih banyak digunakan oleh pengamat Barat dibandingkan secara resmi oleh Rusia, konsep ini tetap menggambarkan bagaimana Rusia memandang peperangan modern sebagai kombinasi dari berbagai instrumen kekuasaan negara. Dalam perang Rusia–Ukraina, kontra-strategi Rusia juga terlihat melalui pendekatan anti-access/area denial (A2/AD). Strategi ini bertujuan membatasi kemampuan lawan, terutama NATO, untuk memasuki atau beroperasi di wilayah tertentu. Rusia memperkuat sistem pertahanan udara, rudal jarak jauh, dan kemampuan elektronik di kawasan strategis seperti Kaliningrad, Laut Hitam, dan Krimea (Kofman & Fink, 2020). Dengan strategi tersebut, Rusia berupaya menciptakan zona pertahanan yang sulit ditembus sehingga dapat menghambat mobilitas militer NATO di kawasan Eropa Timur.

Modernisasi militer juga menjadi bagian penting dari doktrin pertahanan Rusia. Sejak tahun 2008, Rusia melakukan reformasi militer besar-besaran setelah menyadari kelemahan operasionalnya dalam perang melawan Georgia. Reformasi ini mencakup peningkatan profesionalisme pasukan, pengembangan teknologi militer modern, serta investasi besar dalam sistem persenjataan baru seperti rudal hipersonik, drone, dan sistem pertahanan udara canggih S-400 dan S-500 (McDermott, 2017). Modernisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Rusia dalam menghadapi ancaman asimetris maupun konvensional. Dalam konflik Ukraina, Rusia juga menggunakan strategi tekanan energi dan ekonomi sebagai bagian dari kontra-strateginya terhadap Barat. Rusia memanfaatkan posisinya sebagai salah satu pemasok energi utama Eropa untuk memberikan tekanan politik terhadap negara-negara yang mendukung Ukraina. Ketergantungan beberapa negara Eropa terhadap gas Rusia menciptakan dilema strategis bagi NATO dan Uni Eropa dalam merespons agresi Rusia secara tegas (Mankoff, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi Rusia tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat geopolitik. Selain itu, Rusia mengandalkan kemampuan nuklir sebagai elemen penting dalam doktrin pertahanannya. Rusia memandang senjata nuklir sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan kekuatan global dan mencegah intervensi langsung NATO. Doktrin nuklir Rusia memungkinkan penggunaan senjata nuklir dalam kondisi tertentu apabila eksistensi negara dianggap terancam (Sokov, 2020). Pendekatan ini dikenal sebagai “escalate to de-escalate”, yaitu penggunaan ancaman nuklir terbatas untuk memaksa lawan menghentikan eskalasi konflik. Strategi ini menjadi perhatian besar bagi komunitas internasional karena meningkatkan risiko ketidakstabilan global.

Di sisi lain, kontra-strategi Rusia juga dipengaruhi oleh persepsi historis dan identitas nasional Rusia. Rusia melihat Ukraina sebagai wilayah yang memiliki hubungan historis, budaya, dan geopolitik yang sangat dekat dengan Rusia. Oleh karena itu, kedekatan Ukraina dengan NATO dan Uni Eropa dipandang sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh Rusia di kawasan pasca-Soviet (Mearsheimer, 2014). Persepsi ini mendorong Rusia untuk mengambil

langkah militer guna mempertahankan *sphere of influence* atau kawasan pengaruh tradisionalanya. Namun demikian, strategi militer Rusia juga menghadapi berbagai tantangan. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun Rusia memiliki kekuatan militer besar, pelaksanaan operasionalnya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Perlawanan kuat dari Ukraina, dukungan militer Barat, serta sanksi ekonomi internasional menyebabkan Rusia menghadapi tekanan besar baik secara militer maupun ekonomi. Banyak analis menilai bahwa Rusia meremehkan kemampuan pertahanan Ukraina dan solidaritas negara-negara Barat dalam mendukung Kyiv (Freedman, 2022).

Selain itu, perang berkepanjangan juga memperlihatkan keterbatasan logistik, koordinasi, dan efektivitas strategi Rusia di lapangan. Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi modern memainkan peran penting dalam peperangan kontemporer. Penggunaan drone, satelit, perang siber, dan sistem informasi menjadi bagian integral dalam strategi Rusia maupun Ukraina. Rusia menggunakan serangan siber untuk menargetkan infrastruktur penting Ukraina, sementara Ukraina memanfaatkan dukungan intelijen dan teknologi Barat untuk mempertahankan wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin militer modern tidak lagi hanya bergantung pada jumlah pasukan atau kekuatan senjata konvensional, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan informasi. Secara keseluruhan, doktrin militer dan kontra-strategi Rusia mencerminkan upaya Rusia mempertahankan kepentingan nasional dan pengaruh geopolitiknya di tengah persaingan global dengan Barat. Rusia mengombinasikan kekuatan militer konvensional, perang hibrida, strategi nuklir, operasi informasi, dan tekanan ekonomi sebagai bagian dari pendekatan strategisnya. Konflik Rusia–Ukraina menjadi contoh nyata bagaimana doktrin tersebut diterapkan dalam praktik. Namun, perang ini juga menunjukkan bahwa strategi Rusia menghadapi tantangan besar akibat resistensi Ukraina, dukungan Barat, dan perubahan karakter peperangan modern yang semakin kompleks.

Implikasi Terhadap Tatanan dan Arsitektur Keamanan Internasional

Perang Rusia-Ukraina yang meletus secara penuh pada Februari 2022 merupakan titik infleksi paling signifikan dalam sejarah keamanan internasional pascaberakhirnya Perang Dingin. Tatanan keamanan Eropa yang dibangun di atas fondasi arsitektur multilateral meliputi Piagam Paris 1990, Memorandum Budapest 1994, dan komitmen Akta Pendirian NATO-Rusia 1997 mengalami kehancuran struktural yang tidak dapat dipulihkan secara sederhana. Dalam perspektif neorealisme, sistem internasional bersifat anarki, dan negara-negara besar tidak akan pernah sepenuhnya menyerahkan kalkulasi keamanannya kepada institusi multilateral yang bersifat sukarela (Waltz, 1979). Tatanan pasca-Perang Dingin, yang sering disebut sebagai “peace dividend” (dividen perdamaian), sesungguhnya mengandung ketegangan laten yang tak terselesaikan: ambiguitas mengenai batas ekspansi NATO ke timur dan ketidakjelasan status keamanan negara-negara bekas blok Soviet, khususnya Ukraina (Allison, 2014). Mearsheimer berargumen bahwa Barat secara konsisten mengabaikan kepekaan geopolitik Rusia dengan mendorong ekspansi NATO menuju perbatasan Rusia (Mearsheimer, 2014, p. 79). Menggunakan logika Balance of Power (perimbangan kekuasaan), ia menegaskan bahwa tidak ada kekuatan besar manapun yang akan membiarkan aliansi militer musuh utamanya mendekati jantung wilayahnya tanpa respons. Realitas ini menjadi semakin akut tatkala wacana

keanggotaan Ukraina dalam NATO pada KTT Bucharest 2008 memperdalam dilema keamanan (security dilemma) Kremlin. Sebagaimana dijelaskan oleh Jervis, security dilemma terjadi ketika langkah defensif satu pihak ditafsirkan sebagai 19 ancaman ofensif oleh pihak lain, sehingga memicu eskalasi spiral yang tidak dikehendaki oleh siapapun namun sulit dihentikan (Jervis, 1978).

Invasi 2022 adalah manifestasi terlambat namun dramatis dari dinamika spiral ini, yang sekaligus meruntuhkan seluruh fondasi arsitektur keamanan kooperatif yang dibangun selama tiga dekade pasca-1991. Kehancuran tatanan keamanan lama secara paradoks melahirkan dorongan remilitarisasi Eropa dengan skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sejak era Perang Dingin. Data Stockholm International Peace Research Institute mencatat lonjakan signifikan pengeluaran pertahanan negara-negara anggota NATO di Eropa pasca-2022 (SIPRI Military Expenditure Database, 2024). Jerman, yang selama puluhan tahun menganut kebijakan Zurückhaltung (pengendalian diri militer), mengumumkan paket dana pertahanan luar biasa (Sondervermögen) senilai 100 miliar euro, menandai pergeseran doktrin fundamental dalam politik keamanan Berlin. Polandia meningkatkan anggaran pertahanannya hingga melampaui 4 persen dari PDB tertinggi di antara seluruh anggota NATO sementara negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania mempercepat modernisasi militer mereka secara besar-besaran (Perkuhn & Overhaus, 2023, p. 425). Dinamika remilitarisasi ini tidak dapat dipisahkan dari logika deterrence strategy strategi penangkalan yang kini menjadi paradigma dominan dalam kalkulasi pertahanan Eropa.

NATO Strategic Concept 2022 secara eksplisit mengidentifikasi Rusia sebagai “ancaman paling signifikan dan langsung” terhadap keamanan aliansi, menggeser narasi dari kemitraan strategis menuju postur pencegahan kolektif yang tegas (NATO, 2022, p. 4). Konsep Deterrence by Denial mencegah agresi dengan memastikan bahwa musuh tidak akan mampu mencapai tujuan militernya kini menggantikan model keterlibatan dan dialog yang menjadi ciri khas kebijakan keamanan Eropa di era 1990-an dan 2000-an. Dalam kerangka neorealis Waltz, respons ini dapat dipahami sebagai perilaku internal balancing, di mana negara-negara meningkatkan kapabilitas militer domestik sebagai reaksi terhadap ancaman yang mereka persepsikan dari Rusia (Waltz, 1979). Salah satu konsekuensi paling dramatis dari perang ini terhadap arsitektur keamanan Eropa adalah berakhirnya netralitas strategis Finlandia dan Swedia dua negara yang telah mempertahankan status non-blok selama beberapa dekade. Finlandia resmi bergabung dengan NATO pada April 2023, diikuti oleh Swedia pada Maret 2024.

Dengan bergabungnya Finlandia, NATO kini memperoleh perbatasan darat langsung dengan Rusia sepanjang lebih 20 dari 1.300 kilometer sebuah perubahan geostrategis yang secara ironis merupakan kebalikan sempurna dari tujuan strategis Kremlin dalam meluncurkan invasi. Sebagaimana dianalisis oleh Freedman, perang Rusia di Ukraina telah menghasilkan konsekuensi strategis yang bertolak belakang dengan kalkulasi awal Moskow: alih-alih melemahkan dan memecah-belah NATO, invasi tersebut justru merevitalisasi kohesi aliansi dan memperluas jangkauannya secara signifikan (Freedman, 2022, p. 215). Ini merupakan sebuah kegagalan strategis yang fundamental, di mana means (cara) yang digunakan Rusia kekerasan militer terbuka ternyata menghasilkan ends (tujuan) yang berkebalikan dari yang diharapkan. Perluasan NATO ke utara juga mengubah keseimbangan kekuasaan di kawasan

Baltik dan Arktik secara mendasar. Dalam terminologi Waltz, ini adalah contoh nyata dari external balancing, di mana negara-negara yang merasa terancam bergabung dalam aliansi untuk mengimbangi kekuatan yang mereka persepsikan sebagai ancaman (Waltz, 1979). Fenomena ini secara telak membantah asumsi bahwa NATO adalah institusi yang kehilangan relevansinya pascaberakhirnya Perang Dingin. Sebaliknya, perang Ukraina telah membuktikan bahwa institusi keamanan kolektif tetap memiliki daya tarik eksistensial ketika ancaman keamanan yang nyata dan konkret hadir di doorstep suatu kawasan (Lanoszka & Hunzeker, 2022, p. 183). Di sisi lain, Rusia merespons isolasi geopolitik yang ditimpakan oleh Barat melalui konsolidasi kemitraan strategis dengan aktor-aktor non-Barat, yang paling signifikan adalah Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Kemitraan Rusia-Tiongkok yang diperdalam melalui deklarasi “tanpa batas” (no-limits partnership) yang diumumkan pada Februari 2022 mencerminkan konvergensi kepentingan strategis yang melampaui sekadar hubungan transaksional. Bagi Tiongkok, melemahnya Rusia di tangan Barat akan menciptakan preseden berbahaya terkait intervensi dalam urusan domestik kekuatan besar, sementara Tiongkok sendiri menghadapi skenario serupa terkait Taiwan. Bagi Rusia, kemitraan ini menyediakan jalur ekonomi vital untuk menghadapi tekanan sanksi Barat dan mengkompensasi isolasi dari pasar keuangan global (Trenin, 2023). Hubungan Rusia dengan Iran dan Korea Utara menambahkan dimensi lain yang semakin meresahkan tatanan keamanan internasional. Pasokan drone Shahed-136 dari Iran dan amunisi artileri serta rudal balistik dari Korea Utara kepada Rusia menunjukkan terbentuknya ekosistem kerja sama pertahanan di antara negara-negara yang sama-sama 21 berada di bawah rezim sanksi Barat (BerZinš, 2023).

Perkembangan ini menandai terbentuknya apa yang oleh berbagai analis disebut sebagai “axis of sanctions-busting” suatu poros negara-negara yang secara kolektif menantang dominasi sistem internasional berbasis aturan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam konteks Balance of Power, fenomena ini dapat dibaca sebagai upaya counter-balancing terhadap hegemoni Barat, di mana negara-negara yang berbagi persepsi tentang ancaman eksistensial dari tatanan liberal Barat saling mengkonsolidasikan sumber daya (Pant & Super, 2023, p. 130). Konflik Rusia-Ukraina telah mempercepat munculnya polarisasi global baru yang membentuk lanskap geopolitik abad ke-21. Polarisasi ini tidak identik dengan bipolaritas Perang Dingin yang rigid, namun mencerminkan sebuah tatanan multipolar yang asimetris, di mana dua kluster kekuatan besar bersaing dalam dimensi militer, ekonomi, teknologi, dan normatif secara bersamaan. Di satu kutub berdiri blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan diperkuat oleh kohesi NATO yang diperbarui, serta mitra Indo-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di kutub lain, terbentuk konvergensi longgar namun semakin menguat antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara, yang berbagi kepentingan dalam mengikis dominasi tatanan berbasis aturan (rules-based order) yang dipimpin Barat. Berbagai kajian menggarisbawahi bahwa polarisasi ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup persaingan teknologi kritis, kendali rantai pasokan global, dan perebutan pengaruh di kawasan Selatan Global (Global South) (RAND Corporation, 2023, p. 22; CSIS, 2023).

Implikasi dari polarisasi ini terhadap institusi internasional sangat signifikan. Dewan Keamanan PBB mengalami kelumpuhan fungsional akibat hak veto Rusia dan pada isu-isu tertentu Tiongkok, memperlihatkan batas struktural dari multilateralisme berbasis konsensus

kekuatan besar. Tatanan keamanan internasional yang bertumpu pada institusi-institusi yang lahir dari konsensus pasca-1945 menghadapi ujian legitimitas yang belum pernah seberat ini. Sebagaimana dianalisis oleh Buzan, institusi keamanan internasional hanya berfungsi efektif sepanjang negara-negara kuat yang membentuknya masih memiliki kepentingan bersama yang cukup untuk menjaga kepatuhan kolektif (Buzan, 1994). Ketika kekuatan-kekuatan besar terpecah secara fundamental dalam persepsi ancaman dan visi tatanan global, institusi multilateral akan cenderung menjadi arena konflik normatif daripada mekanisme resolusi konflik. Allison mencatat bahwa pola intervensi yang menyangkal tanggung jawab (*deniable intervention*) yang digunakan Rusia di Ukraina sejak 2014 telah 22 membuka preseden berbahaya bagi norma-norma hukum internasional (Allison, 2014).

Secara keseluruhan, perang Rusia-Ukraina telah menghasilkan transformasi arsitektur keamanan internasional yang bersifat struktural dan kemungkinan besar ireversibel dalam jangka menengah. Runtuhnya tatanan keamanan kooperatif pasca-Perang Dingin, remilitarisasi Eropa, perluasan NATO ke Finlandia dan Swedia, serta terbentuknya poros Rusia-Tiongkok-Iran-Korea Utara merupakan komponen-komponen dari pergeseran sistemik menuju tatanan keamanan yang lebih terfragmentasi, kompetitif, dan rentan terhadap eskalasi. Dalam kerangka neorealis, pergeseran ini merupakan respons yang dapat diprediksi terhadap perubahan distribusi kapabilitas dan persepsi ancaman di sistem internasional yang tetap bersifat anarki (Waltz, 1979). Dilema keamanan yang diuraikan oleh Jervis kini bukan hanya relevan untuk menjelaskan asal-usul konflik, tetapi juga untuk memahami dinamika spiralisasi senjata dan aliansi yang sedang berlangsung di seluruh belahan dunia (Jervis, 1978). Tantangan terbesar bagi komunitas internasional ke depan adalah merancang mekanisme manajemen konflik dan komunikasi strategis yang mampu mencegah eskalasi tanpa secara naif mengabaikan realitas kompetisi kekuasaan yang telah kembali menjadi ciri dominan politik internasional abad ke-21. Hermawanto mengingatkan bahwa pemahaman mendalam tentang logika perang dan strategi adalah prasyarat bagi setiap upaya pencegahan konflik yang substantif (Hermawanto, 2026), sementara kajian pengkajian strategis yang dikembangkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dkk. menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam memahami dinamika keamanan yang semakin kompleks ini (Anak Agung Banyu P., dkk., 2013).

KESIMPULAN

Konflik Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa dinamika politik internasional masih sangat dipengaruhi oleh logika kekuasaan dan keamanan sebagaimana dijelaskan dalam teori Neorealisme Struktural. Ekspansi NATO ke Eropa Timur dipersepsikan Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan kawasan pengaruh tradisionalnya, sehingga memunculkan *security dilemma* antara Rusia dan Barat. Dalam kondisi sistem internasional yang anarkis, setiap negara berupaya meningkatkan keamanan dan mempertahankan posisi strategisnya melalui penguatan militer, pembentukan aliansi, serta strategi penangkalan. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO menjadi salah satu faktor utama yang 23 memperburuk ketegangan geopolitik karena dianggap Rusia dapat mengurangi kedalaman strategis pertahanannya. NATO dalam konflik ini menerapkan strategi intervensi tidak langsung dengan memberikan dukungan militer, intelijen, logistik, dan pelatihan kepada Ukraina tanpa terlibat langsung dalam peperangan. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina

sekaligus mencegah eskalasi konflik menjadi perang terbuka antara NATO dan Rusia yang berpotensi memicu konfrontasi nuklir. Sebaliknya, Rusia mengembangkan doktrin militer modern yang mengkombinasikan perang hibrida, modernisasi persenjataan, strategi A2/AD, tekanan ekonomi, operasi informasi, dan ancaman nuklir sebagai bentuk kontra-strategi terhadap Barat. Selain berdampak pada hubungan Rusia dan NATO, perang Rusia–Ukraina juga membawa perubahan besar terhadap tatanan keamanan internasional. Konflik ini mendorong remilitarisasi Eropa, memperkuat solidaritas NATO, mempercepat bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO, serta memunculkan polarisasi geopolitik baru antara blok Barat dan kekuatan revisionis seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Dengan demikian, perang Rusia–Ukraina tidak hanya merupakan konflik regional, tetapi juga menjadi simbol kembalinya persaingan kekuatan besar dalam sistem internasional abad ke-21 yang semakin kompleks, kompetitif, dan rentan terhadap eskalasi global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Allison, R. (2014). Russian ‘deniable’ intervention in Ukraine and the risks for the broader European security order. *International Affairs*, 90(6). <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12170>
- Anak Agung Banyu P., dkk. (2013). Pengantar kajian strategis. *Graha Ilmu*. 1255–1279.
- BerŽinš, J. (2023). The theory and practice of new generation warfare: The case of Ukraine and Syria. *The Journal of Slavic Military Studies*, 36(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/13518046.2023.2174525>
- Brodie, Bernard. (1959). *Strategy in the Missile Age*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Buzan, B. (1994). *An introduction to strategic studies: Military technology and international relations*. Macmillan Press.
- Ciaramella, E., & Green, E. (2025, February 14). Ukraine, NATO, and war termination. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/reports/ukraine-nato-and-war-termination>
- Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Cindy Atsetya, E., & Damayanti, R. (2025). TRANSFORMASI PERAN NATO DALAM MENANGGAPI ANCAMAN RUSIA PASCA INVASI KE UKRAINA: TINJAUAN GEOPOLITIK DAN KEAMANAN KOLEKTIF. *Jurnal Riset Multi Disiplin*, 9(7).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- CSIS. (2023). *NATO at the crossroads: Implications of the Russia-Ukraine war for alliance cohesion and deterrence*. Center for Strategic and International Studies.
- Eichler, J. (2021). *NATO’s expansion after the Cold War: Geopolitics and impacts for international security*. Springer.
- Freedman, L. (2022). *Command: The politics of military operations from Korea to Ukraine*. London: Allen Lane.

- Freedman, L. (2022). *Ukraine and the art of strategy*. Oxford University Press.
- Galeotti, M. (2019). *Russian political war: Moving beyond the hybrid*. London: Routledge.
- Galeotti, M. (2022). *Putin's wars: From Chechnya to Ukraine*. Osprey Publishing.
- Gerasimov, V. (2013, 27 Februari). The value of science in prediction. *Military-Industrial Kurier*.
- Goldgeier, J., & Shiffrinson, J. R. I. (2023). *Evaluating NATO enlargement: From Cold War victory to the Russia-Ukraine war*. Springer.
- Hermawanto, A. (2026). *Pengantar studi perang*. Madani Kreatif.
- Hermawanto, A. (2026). *Pengantar studi perang*. Madani Kreatif.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies.
- Ikhwan, M. (2019). *Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal*. In I.
- Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Jervis, R. (1977). Cooperation under the security dilemma. 167–214.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Karaganov, S. (2022). The new world order and Russia's role in it. *Russia in Global Affairs*, 20(3), 5–22.
- Kofman, M., & Fink, A. (2020). *Russian military strategy: Core tenets and operational concepts*. Washington, DC: CNA.
- Kukla, M. J., & Batta, A. (2026). A new security framework for nato's eastern flank. The US Army War College <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3395> Quarterly: Parameters, 56(2).
- Kulesa, L., & Raynova, D. (2023). *Rebuilding European security architecture after the Ukraine war*. European Leadership Network Policy Brief.
- Lanoszka, A., & Hunzeker, M. (2022). Conventional deterrence and the future of NATO's eastern flank. *Journal of Strategic Studies*, 45(2), 179–210. 26 <https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1897374>
- Mankoff, J. (2022). *Empires of Eurasia: How imperial legacies shape international security*. New Haven: Yale University Press.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górka, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766--779.
- McDermott, R. (2017). *Russia's conventional armed forces and the Georgian war*. Washington, DC: Jamestown Foundation.
- Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal delusions that provoked Putin. *Foreign Affairs*, 93(5), 77–89.
- Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine crisis is the West's fault. *Foreign Affairs*, 93(5), 77–89.
- Mearsheimer, J. J. (2014, September/October). Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal delusions that provoked Putin. *Foreign Affairs*, 93(5), 77–89.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis*, 45(1), 93–119.
- Mills, C., & Brian, P. (n.d.). *Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine*. House of Common Library. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9728/CBP-9728.pdf> (2024)

- Muhsin, A. (2026). Peran Kerjasama Nato dan Ukraina Terhadap Keamanan Ukraina.
- Odgaard, L. (2007). The balance of power in Asia-Pacific security: US-China policies on regional order. Routledge.
- Ozgoeker, U. (2017). NATO and Russia's security dilemma within the European Union's far neighbors. *Journal of Social Sciences*.
- Pant, H. V., & Super, J. (2023). The Russia-China partnership and the transformation of global order. *Asian Security*, <https://doi.org/10.1080/14799855.2022.2134556> 19(2), 123–141.
- Perkuhn, R., & Overhaus, M. (2023). European defence integration after Ukraine: The return of territoriality. *European Security*, <https://doi.org/10.1080/09662839.2023.2208310>
- RAND Corporation. (2023). After Ukraine: NATO's strategic adaptation and European security architecture.
- Sokov, N. (2020). Russia's nuclear doctrine. *Russian Politics*, 5(3), 417–434.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Carnegie Endowment for International Peace. Tril, M. (2025, November 5). NATO confirms \$60 bn Ukraine aid package for 2026, double of country's self-funding capacity. Euromaidan Press.
- Addison-Wesley. Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*.
- Addison-Wesley. Waltz, K. N. (2018). *Man, the state, and war: A theoretical analysis*. Columbia University Press.
- Wemer, D. A., & Pollock, J. (2023). The NATO-Ukraine relationship after the Vilnius summit: Implications for European security. Atlantic Council.
- Wilk, K., & Antczak-Barzan, A. (2023). Poland's defence transformation: From consumer to producer of security. Polish Institute of International Affairs PISM Policy Paper, 12.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.